

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

1. Kompetensi Guru PAI

a. Definisi Kompetensi Guru PAI

Istilah "kompetensi" dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "kewenangan" atau "kekuasaan" untuk mengambil keputusan.¹ Uzer Usman mengatakan Kompetensi merujuk pada "kemampuan dan kewibawaan guru dalam menjalankan profesi keguruannya".² Muhammad Zaini mengatakan kompetensi adalah seseorang yang memiliki sebuah ketrampilan unik yang didapatkan dari proses pembelajaran.

Regulasi yang disebut sebagai UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan PP Standar Nasional Pendidikan No. 19 Tahun 2005 memiliki tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Pasal 8 terutama menekankan bahwa guru harus memenuhi tujuan pendidikan nasional dan sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan kualifikasi akademik. Menurut isi Pasal 8, jelas bahwa guru harus memiliki kemampuan artinya guru yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dapat kehilangan status keguruannya.³

Pengertian "kompetensi" pada bagian I ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki, dipahami, dan dapat digunakan oleh pengajar dan dosen. untuk melakukan pekerjaan mereka.

¹ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1982), 321.

² Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 2006 ed. (Bandung: PT Rosdakarya, t.t.), 14.

³ Sekretariat Negara RI, "Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru," *Citra Umbara*, 2008.

tugas yang diberikan kepada mereka dalam kapasitasnya sebagai guru. Adapun menurut Fullan :

*Competence refers to a wide range of abilities as a completely human trait. Competence is supposed to include all personal affective qualities that are required in the workplace; it is certain that we have a very diverse set of qualities here: attitudes, motives, interests, personal attunements of all kinds, perceptiveness, receptivity, openness, creativity, social skills in general, interpersonal maturity, types of personal identification, and so on as well as knowledge, understandings, action, and skills.*⁴

Artinya: Kompetensi merupakan kemampuan yang luas sebagai atribut sepenuhnya manusia. Kompetensi harus mencakup semua kualitas efektivitas pribadi yang diperlukan di tempat kerja, tentunya di sini kita mempunyai serangkaian kualitas yang sangat beragam: sikap, motivasi, minat, keharmonisan pribadi setiap orang, pola wawasan, penerimaan, keterbukaan, kreativitas, keterampilan sosial umum, kematangan interpersonal, gaya identitas pribadi, serta pengetahuan, pemahaman, tindakan dan keterampilan.

Perspektif Fullan mengenai definisi kompetensi menyoroti kemampuan individu atau komunitas untuk melakukan tindakan, lebih daripada penekanan pada pengetahuan yang dimiliki (kemampuan melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa yang diketahui).

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan (kemampuan berpikir), sikap (kekuatan mental), dan keterampilan (kekuatan fisik), dan dinyatakan dalam tindakan. Oleh karena itu, perolehan dan integrasi informasi, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang ditunjukkan dalam proses berpikir dan pola perilaku seseorang saat melakukan tugas merupakan kompetensi. Sementara menurut Spencer *competence is*

⁴ M.Fullan, *The Future Of Educational Change, The Meaning if Educational Change* (Ontario: OISE Press, t.t.), 288.

*seen as a basic characteristic of a person consisting of knowledge, skills, and attitudes related to the work occupied. A similar understanding was also stated by Noel et al. One's competence is very much related to success in doing work activities.*⁵

Dikatakan oleh Nana Sujana bahwa keterampilan memiliki hubungan dengan kegiatan upaya dalam peningkatan pembelajaran yang dikelompokkan menjadi empat keterampilan diantaranya;

- 1) Membuat perencanaan kegiatan pembelajaran,
- 2) Menjalankan dan mengorganisir kegiatan pembelajaran,
- 3) Mengevaluasi perkembangan kegiatan pembelajaran,
- 4) Memahami materi ajar pada penguasaan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarnya.⁶

Kompetensi Guru mengacu pada kemampuan atau mutu seorang guru dalam lingkungan kelas, yang tercermin dalam penguasaan pengetahuan dan tingkat profesionalisme saat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.⁷ Untuk berhasil dalam pekerjaan mereka, calon guru harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pada dasarnya, fokus kemampuan guru tidak hanya pada kecerdasan untuk mengajar dan siswa belajar. Lebih dari itu, orientasi ini memiliki cakupan luas, yakni menyesuaikan kepentingan dan harapan masyarakat. Diharapkan bahwa guru dapat membentuk individu-individu yang akan berperan dalam pembangunan saat ini, di masa depan, dan di masa yang akan datang. Demikian pula harapannya sebelum siswa

⁵ Abu Siri dkk., "Does Teacher Competence and Commitment Improve Teacher's Professionalism," ed. oleh Pantea Foroudi, *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (1 Januari 2020): 3, <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1781993>.

⁶ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, 2005 ed. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, t.t.), 19.

⁷ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Cet. ke-10 (Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

terjun dan terlibat aktif di masyarakat dapat diberikan bekal ketrampilan oleh lembaga pendidikan

b. Tujuan Kompetensi Guru PAI.

Diantara yang menjadi ciri sebagai pertanda bahwa pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis pendidikan adalah ketidakmampuan guru untuk mewujudkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi guru belum diimbangi dengan kemahiran yang cukup. Maka, diperlukan langkah-langkah menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan guru.⁸

Kompetensi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menjadi guru PAI yang profesional guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Transformasi dan peremajaan sistem pendidikan pada dasarnya berpusat pada "tindakan dan pemikiran guru", atau penguasaan kemampuan guru.

Sesuai dengan tuntutan dunia global, masa depan guru akan mengambil peran dan tanggung jawab yang semakin rumit. Hal ini menuntut guru untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan kemahirannya dalam berbagai kompetensi. Guru harus lebih mudah beradaptasi dan inovatif dalam membina pengalaman belajar siswanya. Seorang guru dapat mengalami kekurangan profesional jika mekanisme dan tren penyebaran informasi yang cepat tidak dipahami oleh mereka. Mereka berisiko kehilangan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat jika hal ini terjadi.

Untuk mengatasi problematika profesional ini, guru harus mengadopsi pola pikir prediktif dan proaktif. Hal ini berarti guru harus secara konsisten menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, calon guru harus memahami pentingnya penelitian dalam meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Dengan dukungan penelitian, guru dapat dengan tulus

⁸ Akhmad Sudrajat, "Kompetensi guru dan peran kepala sekolah," *Equilibrium* 3, no. 5 (2007): 27.

mendorong kreativitas siswa tanpa dibatasi oleh metode pembelajaran yang mungkin mereka anggap efektif.

c. Dasar Kompetensi Guru PAI.

Dasar kompetensi guru PAI ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang kualifikasi dasar guru. Tujuan keseluruhan dari undang-undang ini adalah untuk mengontrol dan meningkatkan standar pengajaran di Indonesia. Selain itu, Pasal 8 menegaskan bahwa pengajar PAI harus mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, memiliki kompetensi akademik, memiliki sertifikasi yang relevan, dan sehat jasmani dan rohani.⁹ Dengan mengacu pada aturan Pasal 8 yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa memiliki kompetensi adalah persyaratan esensial bagi seorang guru. Ini berarti bahwa seorang guru yang tidak memenuhi kompetensi atau tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan akan kehilangan kedudukannya sebagai pendidik.

d. Ruang Lingkup Kompetensi Guru PAI.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tercakup dalam Standar Kompetensi Guru (Permen No. 16 Tahun 2007), yang merupakan pendidikan guru profesional yang komprehensif. Kompetensi guru mula-mula disusun secara menyeluruh. Namun pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan judul empat kelompok kompetensi yang terbagi dalam peraturan menteri. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini terkait dengan kemampuan guru untuk memahami berbagai aspek karakteristik siswa. Hal ini mencakup memahami kepribadian siswa, menyampaikan isi pelajaran secara efektif, memberikan penilaian bermakna terhadap apa yang

⁹ Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 29.

telah diajarkan, dan membina potensi siswa. Kompetensi pedagogi meliputi kemampuan membimbing peserta didik, yang meliputi:

- a) Memahami prinsip dan hakikat pendidikan
- b) Pemahaman yang mendalam terhadap siswa dan kebutuhannya.
- c) Merancang kurikulum dan silabus.
- d) Menyusun rencana pembelajaran yang efektif.
- e) Melaksanakan metode pengajaran dialogis dan interaktif.
- f) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- g) Membimbing peserta didik untuk mewujudkan potensi yang dimilikinya yang beragam.¹⁰

Implikasinya jelas jika seorang guru kurang mampu memahami karakteristik siswa, kesulitan menyampaikan materi pelajaran secara efektif, gagal memberikan penilaian yang bermakna terhadap pengajaran, atau tidak dapat memupuk potensi siswa, maka guru tersebut kurang mempunyai kompetensi pedagogik yang memadai.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan aspek vital dalam profil profesional seorang guru. Ini mencakup serangkaian ciri kepribadian yang penting bagi seorang guru untuk memenuhi perannya secara efektif. Seorang guru harus mewujudkan ciri-ciri kedewasaan, stabilitas, dan kebijaksanaan, yang tidak hanya membangkitkan rasa percaya diri tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mereka hendaknya mempunyai kewibawaan dan akhlak mulia, serta dapat menjadi teladan baik bagi santri maupun masyarakat luas. Selain itu, evaluasi diri dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan merupakan komponen penting dari kompetensi kepribadian. Tanpa kualitas-kualitas ini, kemampuan seorang guru untuk berhubungan dan mempengaruhi

¹⁰ E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 75.

siswa secara positif mungkin dipertanyakan, menekankan pentingnya kompetensi kepribadian dalam bidang pendidikan.¹¹

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah keterampilan yang memungkinkan guru melaksanakan tugas mengajarnya. Ini diterjemahkan langsung ke dalam karya yang dipamerkan, karena guru tidak dapat melakukan pekerjaannya tanpa kompetensi profesional. Tingkat profesionalisme seorang guru dapat diukur dari kemampuannya untuk:

- a) Kompetensi untuk merumuskan perencanaan kegiatan pembelajaran dan pengajaran.
- b) Kompetensi untuk melaksanakan komunikasi kegiatan pembelajaran dan pengajaran.
- c) Kompetensi untuk mengevaluasi peserta didik.¹²

Berbagai kompetensi tersebut di atas berperan penting dalam membantu pendidik dalam mengelola seluruh aspek proses pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kompetensi utama lainnya memungkinkan guru berhasil memfasilitasi pengalaman belajar yang efisien dan produktif bagi siswanya. Kompetensi profesional merupakan faktor mendasar dan sangat diperlukan bagi guru dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Tidak dapat dipungkiri, jika seorang guru kurang profesional maka dapat dipastikan kegiatan pembelajaran tidak akan terlaksana secara maksimal, sehingga berdampak pada kinerja peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut.

4) Kompetensi Sosial

Keterampilan sosial merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yang dapat dicapai melalui pemeliharaan jalur

¹¹ Mulyasa, 117.

¹² Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Rajawali Pre, 2014), 162.

komunikasi yang efektif dengan seluruh staf pengajar, siswa, dan anggota masyarakat.

Kemampuan ini sangat berguna bagi guru untuk memahami keadaan sosial masyarakat. Adapun kemampuan tersebut adalah:

- a) Kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja dalam upaya meningkatkan keterampilan kerja.
- b) Kemampuan Kemampuan untuk mengenali dan memahami fungsi masing-masing sistem sosial.
- c) Kemampuan untuk berkolaborasi secara individu atau berkelompok.
- d) Mampu membiasakan diri untuk mengikuti perkembangan karir.
- e) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan pendidikannya.

5) Kompetensi *Leadership* (Kepemimpinan)

Kapasitas seorang guru untuk mempengaruhi siswa melalui serangkaian perilaku atau kegiatan tertentu yang ditujukan kepada siswa yang dipengaruhinya dikenal sebagai kompetensi kepemimpinan. Dengan memperoleh keterampilan kepemimpinan, guru pendidikan agama Islam dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya. Guru pendidikan agama Islam harus mampu memberikan teladan bagi siswanya dan guru lainnya. Kemampuannya dalam membimbing dan memotivasi setiap siswa madrasah sangat penting dalam praktik pengajaran Islam.¹³ Diantara kompetensi yang dibutuhkan seorang guru PAI (Pendidikan Agama Islam) adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan membuat rencana penanaman ajaran agama dan sifat-sifat mulia kepada warga sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama.

¹³ Satariyah Satariyah dan Nandar Nandar, "Urgensi Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Peserta Didik," *Arfannur* 3, no. 1 (30 April 2022): 6, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i1.632>.

- b) Kemampuan menyusun secara metodis berbagai aspek sekolah untuk mendorong pengembangan pengalaman pendidikan agama dalam komunitas sekolah.
- c) Mampu berperan sebagai mentor, konselor, fasilitator, inovator, dan inspirator.
- d) Kompetensi mengawasi, mengelola, dan membimbing pembinaan pengalaman pengajaran agama di kalangan warga sekolah.¹⁴

Sebagaimana disinggung dalam uraian di atas, Istilah kompetensi guru mempunyai implikasi yang signifikan. Kompetensi ini memberdayakan guru untuk unggul dalam memperoleh sertifikasi yang meningkatkan kewajiban profesional mereka dan berkontribusi pada peningkatan tingkat kesejahteraan. Baik untuk guru pendidikan agama Islam maupun yang lainnya, kemahiran keempat tersebut merupakan indikator yang kuat dari keberhasilan, yang menunjukkan profesionalisme guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif untuk siswanya di sekolah.

e. Standar Kompetensi Guru Profesional

Standarisasi kompetensi guru di tingkat nasional sangatlah penting, karena hal ini merupakan kerangka umum dengan standar minimum dan kriteria kemampuan khusus yang harus dimiliki dan dipahami oleh setiap guru. Standardisasi ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang obyektif, memastikan dan mengatur kualitas guru, dan, lebih jauh lagi, kualitas pendidikan secara keseluruhan. Salah satu contoh standardisasi ini adalah melalui sertifikasi guru dalam jabatan, yang membantu memvalidasi dan memantau kompetensi pendidik.

Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengatur

¹⁴ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010*, Desember 2010, 9.

hal-hal yang berkaitan dengan standar pendidikan di Republik Indonesia. Peraturan ini membahas sejumlah topik, seperti standar penilaian pendidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Secara kolektif, persyaratan ini penting untuk menjamin efektivitas dan kualitas sistem pendidikan Indonesia.¹⁵

Lebih lanjut, kemampuan yang dimaksud pada huruf (d) tentang pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi sosial. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas tinggi, standar-standar ini berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi dan mempertahankan kompetensi pendidik dan profesional pendidikan lainnya.¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Jabatan memuat lebih banyak hal yang rumit, rincian teknis. Peraturan-peraturan ini memberikan suatu kerangka yang komprehensif untuk menjelaskan kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan dari pendidik dan guru dalam sistem pendidikan Indonesia.

f. Mengukur Keprofesionalan Guru

Sebelum tahun 2005, pengembangan kompetensi guru di Indonesia telah mengalami beberapa

¹⁵ “PP-2005-19-SNP.pdf,” diakses 2 Mei 2023, <https://biologi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PP-2005-19-SNP.pdf>.

¹⁶ “UU14-2005GuruDosen.pdf,” diakses 19 Januari 2023, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>.

periode. Penjelasannya diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sejarah pendidikan guru di Indonesia dapat dijejaki sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa itu, kualifikasi akademik guru di Tanah Air mengalami peningkatan, seiring dengan kebutuhan aktual pengajar di setiap era. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan melihat dan meniru, di mana siswa mengamati cara para guru senior mengajar dan kemudian mencontohnya. Setelah menyelesaikan pendidikan ini, siswa ditempatkan sebagai guru Volksschool, yaitu SD dengan kurikulum yang sangat sederhana, fokus pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
- 2) Kursus Pendidikan Kepegawaian dan Kebudayaan (KPKPKB) ditingkatkan pada tahun 1975 menjadi Sekolah Guru B (SGB) selama empat tahun sebelum berkembang menjadi Sekolah Guru A (SGA) selama enam tahun. Teknik pengajaran, pengelolaan kelas, pembuatan kurikulum, dan penelitian dasar merupakan beberapa kompetensi guru selama ini.
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 0134/0/1994 mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi akademik guru. Standar-standar ini, yang mencakup kredensial akademik, keahlian, dan sertifikasi guru, memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan standar profesional dan harapan bagi para pendidik di Indonesia.¹⁸
- 4) Pada tahun 2005, dibentuk Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjelaskan tentang persyaratan, keahlian, dan sertifikasi pendidik sebagai tenaga profesional yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan

¹⁷ Suparlan, "Menelusuri Jejak Sejarah Perkembangan Kompetensi Guru di Indonesia," *Suparlan.org* (blog), 24 Juli 2010, <https://suparlan.org/29/menelusuri-jejak-sejarah-perkembangan-kompetensi-guru-di-indonesia>.

¹⁸ Cahyana, Ade. "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru dalam Menghadapi Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 16, no. 1, 2010, pp. 85-91, doi:10.24832/jpnk.v16i1.434.

proses pendidikan, menilai hasil proses tersebut, memberikan arahan dan pengajaran, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi pedagogi, psikologis, sosial, dan profesional semuanya merupakan bagian dari kompetensi guru.¹⁹

Sebelum adanya program sertifikasi guru, proses melakukan pengukuran kompetensi guru adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Pengukuran kinerja guru melalui penilaian oleh kepala sekolah atau atasan langsung. Penilaian ini dilakukan berdasarkan observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, seperti persiapan mendidik, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran siswa.
- 2) Pengukuran kinerja guru melalui penilaian oleh rekan kerja atau sesama guru. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap kinerja guru, baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Pengukuran kinerja guru melalui penilaian oleh siswa. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap kinerja guru, baik secara lisan maupun tertulis.
- 4) Pengukuran kinerja guru melalui penilaian oleh orang tua siswa. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap kinerja guru, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam pelaksanaannya belum ada kriteria dan subjektivitas tertentu dalam mengevaluasi efektivitas guru dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik, pemerintah mencanangkan program sertifikasi guru. Dengan memastikan bahwa guru memenuhi kriteria

¹⁹http://eprints.undip.ac.id/53970/1/Peningkatan_Kompetensi_dan_Profesionalisme_Guru_Sejarah.pdf

²⁰ Reisky Bestary, "Pentingnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) Untuk Pengembangan Karir Guru," *BPMP Riau* (blog), 27 Januari 2014, <https://bpmpriau.kemdikbud.go.id/2014/01/pentingnya-penilaian-kinerja-guru-pkg-untuk-pengembangan-karir-guru/>.

intelektual dan kompetensi yang diperlukan, program ini berupaya menjamin bahwa mereka dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif.

Selain itu pada zaman sebelum adanya sertifikasi guru, pengukuran kompetensi guru dilakukan dengan cara-cara berikut:²¹

1) Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk mengembangkan kompetensi pada zaman dulu. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan formal pada zaman dulu lebih menekankan pada penguasaan materi pelajaran dan kurikulum yang telah ditentukan.

2) Pelatihan kerja

Pelatihan kerja merupakan cara lain yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi pada zaman dulu. Pelatihan kerja dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pelatihan kerja. Pelatihan kerja pada zaman dulu lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dan teknik kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu.

3) Pengalaman kerja

Pengalaman kerja juga dapat menjadi cara untuk mengembangkan kompetensi pada zaman dulu. Dengan bekerja di bidang tertentu, seseorang dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut.

4) Pelatihan non-formal

Pelatihan non-formal seperti kursus atau pelatihan singkat juga dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi pada zaman dulu. Pelatihan non-formal pada zaman dulu lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dan

²¹ Dewi Purwasih, "Studi Komparatif Kinerja Guru Sebelum Dengan Sesudah Bersertifikasi Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran di SMAN 1 Tabanan," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 1, no. 1 (13 Mei 2013), <https://doi.org/10.23887/jjpe.v1i1.476>.

pengetahuan yang spesifik dan terkait dengan pekerjaan tertentu.

5) Pengembangan diri

Pengembangan diri juga dapat menjadi cara untuk mengembangkan kompetensi pada zaman dulu. Pengembangan diri dapat dilakukan melalui membaca buku, mengikuti seminar atau workshop, atau bergabung dengan organisasi atau komunitas tertentu.²²

2. Implementasi Kurikulum Merdeka

Sebelum membahas tentang kurikulum merdeka maka terlebih dahulu untuk mengetahui sejarah kurikulum di Indonesia agar mengetahui perkembangan kurikulum hingga munculnya kurikulum merdeka.

a. Sejarah Kurikulum

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, peluncuran dan penggantian kurikulum seringkali berlangsung dengan cepat. Namun, persepsi umum masyarakat terhadap proses ini sering tergambar sebagai "ganti menteri pendidikan, lalu ganti kurikulum." Padahal, penggantian kurikulum adalah hal yang lumrah dalam sistem pendidikan negara-negara maju di seluruh dunia. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga kurikulum di lembaga pendidikan Indonesia tidak boleh tetap statis. Analisis, prediksi, dan berbagai masalah internal dan eksternal yang terus berubah menentukan pengembangan kurikulum.

1) Kurikulum sebelum Kemerdekaan Bung Karno.

Sisa-sisa kolonialisme dan penjajahan tetap mendominasi pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, pengaruh sejarahnya tetap ada. Warisan kolonial, termasuk sistem pendidikan, masih ada di negara ini. Bukan hanya sistem pendidikan

²² Mariana Ulfah Hoesny dan Rita Darmayanti, "Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, no. 2 (t.t.).

secara global, melainkan juga pendidikan Islam di Indonesia terkena dampak ini. Sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan kepentingan kolonial, khususnya kolonialisme Belanda dan Jepang, yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan pendidikan di negara ini.

Kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan masih dipengaruhi oleh sisa-sisa kolonialisme. Sistem pendidikan secara khusus dipengaruhi oleh gaya kolonial. Akibatnya, kurikulum dan sistem pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, didasarkan pada gagasan dan kepentingan kolonialisme Belanda. Di masa lalu, negara-negara Eropa, termasuk Belanda, memiliki tujuan utama untuk menyebarkan agama mereka. Akibatnya, kekuatan kolonial Eropa mendirikan lembaga pendidikan di kepulauan Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 dengan tujuan utama menyebarkan agama Kristen di sana. Dunia pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh peristiwa sejarah ini, yang membentuk bagaimana pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, dirancang dan diajarkan.²³

2) Kurikulum pada Orde Lama (Soekarno)

Kurikulum pada masa Orde Lama telah mengalami perubahan selama perkembangannya. Itu dibagi menjadi dua bagian yang berbeda setiap tahunnya. Beberapa perkembangan utama termasuk:

a) Kurikulum pada Orde Lama 1947

Kurikulum Orde Lama, yang pertama kali dibuat pada tahun 1947, mulai digunakan pada tahun 1950. Karena itu, beberapa guru percaya bahwa pengembangan kurikulum tersebut benar-benar dimulai pada tahun 1950. Untuk memperkenalkan dan mengatur pendidikan agama Islam dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kurikulum ini terus mendapat

²³ Muhaimin, *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*, Ed. 1, cet. 6 (Rajawali Pers, 2014), 115.

pengaruh kuat dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Akibatnya, sistem ini dianggap agak rapuh, dan banyak elemen sistem pendidikan Belanda yang masih bertahan, menjadikan pendidikan gaya kolonial Belanda sebagai kekuatan dominan dalam kurikulum pada saat itu.²⁴ Memang benar, bukan hanya sistem pendidikan Belanda yang meninggalkan jejaknya pada kurikulum Indonesia; Jepang juga berperan dalam mempengaruhi kurikulum Indonesia pasca kemerdekaan. Warisan sejarah berbagai kekuatan kolonial dan pengaruh asing telah membentuk perkembangan pendidikan dan kurikulum di Indonesia selama bertahun-tahun.

b) Kurikulum 1952-1964

UPPP (UU Pendidikan Dasar dan Pengajaran) Nomor 4 Tahun 1950 adalah undang-undang yang sangat penting untuk mengatur cara pembelajaran dijalankan dalam kurikulum. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh dua Menteri pada tahun 1951 mencantumkan ketentuan tambahan. SKB ini menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal harus mengadakan pendidikan agama selama minimal dua jam seminggu. Dalam hal ini, Departemen Agama (DEPAG) telah melakukan banyak hal untuk menciptakan kurikulum agama di sekolah dan pesantren. Siswa diharuskan menerima 25% dari pelajaran mingguan mereka tentang agama dalam semua bidang studi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama harus menjadi bagian dari kurikulum Indonesia.²⁵ Di masa lalu, banyak orang tua lebih memilih pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah karena kewajiban untuk memberikan dua jam

²⁴ Lalu Muhammad Iqbal dan Zahrotul Hayati, "Perkembangan Kurikulum di Indonesia," *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (13 Juni 2023): 115–26, <http://ejournal.unwmataram.ac.id/taklim/article/view/1742>.

²⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, 2011 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), 98.

pendidikan agama Islam seminggu. Sebelum adanya peraturan ini, orang tua yang ingin memberikan lebih banyak pilihan pendidikan agama kepada anak-anak mereka harus menyekolahkan mereka ke pesantren atau madrasah. Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh dua Menteri pada tahun 1951, para orang tua merasa tenang karena anaknya kini dapat belajar agama di sekolah negeri, meskipun hanya dua jam seminggu. Perubahan ini memperluas akses terhadap pendidikan agama dalam sistem pendidikan publik.

3) Kurikulum pada masa Soeharto (Orde Baru)

Selama transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, atau dari Soekarno ke Soeharto, kepemimpinan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, yang berdampak pada seluruh sistem negara, termasuk sistem pendidikan. Pergantian kepemimpinan juga membawa perubahan pada kurikulum. Berikut adalah beberapa elemen pendidikan penting yang diterapkan selama Orde Baru:

a) Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 yang sebenarnya diperkenalkan merupakan perpanjangan dari kurikulum 1964, dengan penyempurnaan dan penyempurnaan. Kesenambungan kurikulum ini menunjukkan bahwa kurikulum 1968 merupakan evolusi dari kurikulum yang dirancang empat tahun sebelumnya. Pada masa Orde Baru, Kurikulum 1968 merupakan bagian dari tren integrasi kurikulum yang lebih luas. Terkait pendidikan agama, Kurikulum 1968 menganut ketentuan yang sama dengan Kurikulum 1964, yaitu mengalokasikan 2 jam per minggu untuk pendidikan agama.²⁶ Kurikulum 1968, yang terintegrasi dan dibangun berdasarkan kurikulum pendidikan sebelumnya, memainkan peran penting

²⁶ Iqbal dan Hayati, "Perkembangan Kurikulum di Indonesia."

dalam lanskap pendidikan Indonesia pada era tersebut. Ini tidak hanya memasukkan unsur-unsur dari kurikulum sebelumnya tetapi juga melengkapinya, menjadikannya kurikulum ikonik pada masanya. Kurikulum ini menjadi simbol arah dan tujuan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru.

b) Kurikulum Orde Baru tahun 1975

Kurikulum 1968 dirancang dengan fokus yang kuat pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan ekstrakurikuler. Pada era ini diperkenalkan dan dikenal secara luas konsep yang biasa disebut dengan satuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dalam pembahasan pendidikan. Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga kementerian—yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri P&K (Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat)—merupakan perkembangan penting. Bersamaan dengan perubahan tersebut, kurikulum madrasah juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah Islam.²⁷ Kurikulum 1968 meringankan beban orang tua dengan meningkatkan porsi pendidikan agama dari 25 persen menjadi 30 persen, mengalami peningkatan 70% untuk pendidikan umum dan 5% dari kebijakan sebelumnya. Selain itu, ijazah sekolah menengah diakui, dan diizinkan untuk berpindah dari sekolah menengah ke sekolah negeri lainnya.²⁸

c) Kurikulum 1984 (Orde Baru)

Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan baru dimana siswa berperan aktif dalam

²⁷ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., “Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa: Studi Evaluasi,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 3 (12 Juni 2023): 33, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i3.15613>.

²⁸ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia* (Pustaka Setia, 2018), 87.

mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, dan melaporkan. Hal ini melengkapi kurikulum sebelumnya dan mendorong berbagai model pembelajaran, seperti Metode Belajar Siswa Aktif (CBSA). Dalam metode ini, guru terutama berperan sebagai fasilitator, membina partisipasi aktif siswa. Akibatnya, metode ceramah tradisional yang sering dipakai guru mulai ditinggalkan dan digantikan dengan model pembelajaran interaktif.

Kurikulum 1984 tetap mempertahankan alokasi pendidikan agama yang sama seperti pendahulunya, namun mendapat dukungan tambahan melalui Keputusan Menteri No. 2, yang memungkinkan lulusan madrasah melanjutkan pendidikannya di sekolah umum dengan lancar. Kepastian ini menghilangkan kekhawatiran orang tua dan berkontribusi terhadap keinginan yang lebih besar untuk menyekolahkan anak mereka ke madrasah. Kurikulum 1984 memperkenalkan beberapa unsur strategis, antara lain perpaduan yang seimbang antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk program MI, MTs, dan MA. Proses belajar mengajar menekankan keselarasan yang tepat antara apa yang dipelajari siswa dan bagaimana mereka belajar. Pendekatan penilaian yang berkesinambungan dan komprehensif juga digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, mencapai hasil yang lebih baik, dan mengelola program dengan baik.²⁹

d) Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999

Kurikulum periode ini tidak dikembangkan dari awal; Hal ini merupakan hasil upaya penggabungan kurikulum yang sudah ada, khususnya Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Landasan legislatif bagi perkembangan tersebut adalah Undang-undang SISDIKNAS No. 02 Tahun

²⁹ Kemenag RI. (2021). Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam. Retrieved December 25, 2022, from Dirjen Pendis Kemenag RI website: <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>

1989 yang secara resmi mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba namun telah dipersiapkan seiring berjalannya waktu, yang mencerminkan evolusi lanskap pendidikan di Indonesia.

Peraturan yang mewajibkan pendidikan agama sebagai komponen wajib di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, ditetapkan pada tahun 1994. Di sekolah dasar, kurikulum mencakup sembilan mata pelajaran, dan pendidikan agama menjadi salah satunya. Struktur serupa juga terlihat di sekolah menengah pertama, di mana pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan umum.

Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Pendidikan tahun 1989 dan Kurikulum 1994 hingga tahun 1998. Kurikulum ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dan tidak mengubah jumlah jam pembelajaran atau isi atau karakter pendidikan agama siswa. Dimulainya era reformasi setelah rezim Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Para pemerhati pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan mendorong perubahan dan reformasi di bidang pendidikan. Selama periode ini, sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan besar dan arah baru.³⁰

4) Kurikulum pada masa reformasi

Era reformasi yang ditandai dengan fokus pada keterbukaan dan transparansi memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan nasional. Pada periode ini, kurikulum mengalami berbagai perubahan, antara lain:

³⁰ Kemenag RI. (2021). Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam. Retrieved December 25, 2022, from Dirjen Pendis Kemenag RI website: <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>

a) Kurikulum KBK

Maksud dari kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah untuk membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki daya saing, berkembang, dan sejahtera di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan bahwa proses pembelajaran tidak boleh terbatas pada lingkungan sekolah saja, tetapi juga harus meluas pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Demi mendukung transformasi dalam bidang pendidikan, pemerintah meratifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berfokus pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pengenalan kurikulum 2004 mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam, sehingga madrasah lebih mengutamakan kompetensi sebagai landasan program pendidikannya. Hal ini menandai adanya pergeseran pendekatan pendidikan agama di madrasah.³¹

b) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/kurikulum 2006

Pemerintah pusat menetapkan standar dan kompetensi dasar berdasarkan kurikulum ini, sementara sekolah diberi wewenang untuk membuat silabus dan penilaian sesuai dengan situasi khusus mereka. Kementerian Agama membuat kurikulum agama yang menjelaskan bagaimana pendidikan agama Islam diberikan di sekolah dan madrasah. Menteri Agama mengesahkan PERMENAG No. 2 Tahun 2008, yang berfokus pada standar isi dan kompetensi lulusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam skenario ini, madrasah tidak diwajibkan beralih dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 (K13). Sebaliknya, penekanannya terletak pada pengembangan melalui pendekatan

³¹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013., t.t.), 67.

rasional, konstruktif, dan dialogis untuk menyelaraskan kurikulum dengan lanskap pendidikan yang terus berkembang.³²

c) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 (K13) bertujuan untuk mempromosikan pendidikan karakter, memasukkan perspektif lokal, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan ramah siswa. Ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, dengan fokus pada pengembangan keterampilan seperti observasi, bertanya, penalaran, dan komunikasi yang efektif. Untuk beradaptasi dengan tantangan modern dan dinamika masyarakat yang berpotensi rawan konflik, dikembangkan model adaptasi madrasah bernama Pendaimandor. Model ini mencakup komponen-komponen seperti adaptasi multikultural, rekonstruksi kurikulum inklusif, dan internalisasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum tersembunyi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan sekolah dapat menavigasi lanskap pendidikan yang terus berkembang secara efektif.³³ Pengembangan madrasah harus memprioritaskan dua aspek mendasar: transformasi paradigma dan menerjemahkan konsep ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.³⁴

d) Kurikulum Merdeka

Pada 11 Februari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (MendikbudRistek), Nadiem Makarim

³² A. Sukino. Pengembangan Kurikulum Madrasah di Daerah Transisi. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, (2017). 3(01), 24–42. doi: 10.32678/tarbawi.v3i01.1777

³³ Arief Sukino dan Erwin Erwin, “Adaptasi Madrasah di Daerah Rentan Konflik Sosial,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (28 Desember 2019): 259, <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4905>.

³⁴ A. Sukino. Kepemimpinan Transformatif Dalam Pengembangan Manajemen Madrasah Berorientasi Mutu. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, (2016). 3(1), 81–100. doi: 10.33507/an-nidzam.v3i1.10

memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Awalnya disebut sebagai Prototipe Kurikulum dan telah diujicobakan di 2.500 sekolah. Kurikulum Merdeka resmi diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023 pada berbagai tingkatan pendidikan, antara lain TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.³⁵

Kurikulum Merdeka pada dasarnya berpusat pada gagasan bahwa pendidikan harus berakar pada hakikat pembelajaran, dengan menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang unik. Pendekatan ini berarti bahwa kriteria penilaian untuk dua anak dengan minat berbeda mungkin tidak sama. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran atau topik yang menurut mereka tidak menarik. Sebaliknya, kurikulum bertujuan untuk membina dan mengembangkan minat dan bakat anak sejak dini.

b. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum dapat dijelaskan sebagai struktur rencana dan aturan yang menyeluruh yang melibatkan tujuan pendidikan, konten pembelajaran, bahan ajar, dan metode pengajaran. Kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dengan mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Menurut UU No. 20 tahun 2003 kurikulum mengacu pada perencanaan dan pengorganisasian yang berkaitan dengan tujuan, isi mata pelajaran, dan metode yang berfungsi sebagai pedoman dan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁶

Pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memilih menerapkan kurikulum merdeka dengan tujuan mengubah pendidikan utama pada jenjang pendidikan anak usia

³⁵ Hasibuan dkk., "Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa," 317.

³⁶ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013: Konsep & Penerapan* (Surabaya: Kata Pena, 2014), 3.

dini, dasar, dan menengah. Diharapkan pelaksanaan program ini dapat dimulai pada tahun ajaran 2022/2023. Selain itu, Undang-Undang Kementerian Agama Nomor 347 Tahun 2022 juga menetapkan pedoman pelaksanaan belajar merdeka di berbagai sekolah.³⁷

Penyelenggaraan kurikulum merdeka di madrasah berpedoman pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dalam beberapa hal dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus madrasah, dapat dilakukan perubahan untuk memperkuat pendidikan agama Islam dan bahasa Arab yang merupakan ciri khas pendidikan madrasah.

Kurikulum Merdeka di Madrasah mencakup komponen-komponen yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya dan mendorong kreativitas dan inovasi, serta menumbuhkan lingkungan belajar yang dinamis.³⁸

Penerapan Kurikulum pada madrasah untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 diatur sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, madrasah mengadopsi Kurikulum 2013. Di tingkat madrasah masing-masing, madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan kurikulum operasional.
- 2) Madrasah juga menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan ini, madrasah diberi ruang untuk berkreasi dan

³⁷ Muhammad Ali Ramdhani dan Moh Isom, "Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah," t.t., 1.

³⁸ "KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf," T.T., 7.

berinovasi dalam merancang kurikulum operasional di lingkungan madrasah.³⁹

c. Struktur Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka MA atau MAK biasanya terdiri dari dua (dua) elemen: pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Namun, di madrasah, keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan karakteristik siswa pancasila.⁴⁰

Kurikulum MA terdiri dari dua fase: Fase E dan Fase F. Madrasah dapat mengatur materi pembelajaran berbasis proyek dan intrakurikuler secara bersamaan atau secara terpisah. Dalam kasus ini, madrasah dapat memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa mereka. Untuk mendukung tema utama yang dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dari berbagai mata pelajaran dapat bekerja sama dalam jenis pembelajaran ini. Hal ini memungkinkan tercapainya tujuan intrakurikuler sekaligus meningkatkan pengembangan karakter pelajar Pancasila.⁴¹

Pada Tahap E untuk kelas X tingkat MA, kurikulum memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraan mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran ini tidak dibagi lagi ke dalam kategori tertentu, sehingga memberikan kebebasan pada satuan pendidikan untuk menyusun isi pelajaran. Fleksibilitas ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan. Guru dapat menggabungkan materi Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk menekankan hubungan antara subjek. Alternatifnya, mereka dapat

³⁹ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T., 48.

⁴⁰ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T, 35.

⁴¹ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T, 35.

memilih model rotasi, mengajarkan mata pelajaran ini dalam blok waktu terpisah.⁴²

Struktur kurikulum untuk Tahap F pada kelas XI dan XII terdiri atas enam kelompok mata pelajaran utama, yang mencakup mata pelajaran umum, mata pelajaran agama, matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA), ilmu sosial, bahasa dan budaya, serta mata pelajaran kejuruan dan kerajinan. Mata pelajaran umum wajib diikuti oleh semua Sekolah Menengah Atas (MA) Islam dan wajib diambil oleh setiap siswa. Kelompok mata pelajaran agama mewajibkan setiap MA menawarkan minimal empat mata pelajaran. Untuk kelompok Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), setiap MA harus menyelenggarakan minimal tiga mata pelajaran; untuk kelompok IPS, setiap MA harus menyelenggarakan minimal tiga mata pelajaran. Untuk kelompok bahasa dan budaya, mata pelajaran dipilih berdasarkan sumber daya dan kemampuan masing-masing MA. Untuk kelompok kejuruan dan kerajinan, mata pelajaran dipilih sesuai dengan sumber daya dan kemampuan masing-masing MA. Struktur kurikulum ini dirancang untuk memberikan pendidikan komprehensif yang memaparkan siswa pada beragam mata pelajaran dan memungkinkan mereka mengeksplorasi minat dan keterampilan mereka di berbagai bidang studi.⁴³

d. Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah

Di madrasah percontohan, kurikulum bebas diimplementasikan secara berangsur-angsur. Diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Madrasah mengambil inisiatif untuk mempersiapkan sendiri penerapan kurikulum merdeka.

⁴² “ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T,” 35–36.

⁴³ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T, 36.

⁴⁴ KMA No 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.Pdf,” T.T, 48–49.

- 2) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik madrasah, kurikulum operasional dirancang dan dikembangkan oleh madrasah pada tingkat satuan pendidikan.
- 3) Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dapat menghubungi madrasah yang ingin menerima Kurikulum Merdeka.
- 4) Kanwil Kementerian Agama Provinsi menerima usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 5) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengesahkan ajuan dari madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk disetujui.
- 6) Sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka secara resmi diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 7) Madrasah yang ditunjuk untuk menerapkan Kurikulum Merdeka memiliki kesempatan untuk memilih antara dua cara untuk menerapkannya., sebagai berikut:
 - a) Menggunakan beberapa elemen dan pedoman Kurikulum Merdeka tanpa mengubah kurikulum satuan pendidikan. Contohnya, menjalankan proyek penguatan Profil Siswa Pancasila sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.
 - b) Kurikulum Merdeka melibatkan satuan pendidikan mengembangkan berbagai metode pengajaran.
- 8) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penyesuaian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dan Sistem Informasi dan Administrasi Guru (SIMPATIKA).
- 9) Direktorat Jenderal berwenang menunjuk madrasah tertentu sebagai sekolah percontohan penerapan Kurikulum Merdeka.

e. Kegiatan Madrasah dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka

Penyelenggara madrasah dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan dan mendukung Kurikulum Merdeka, seperti:⁴⁵

1) Mengikuti Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam sosialisasi penerapan kurikulum merdeka, berbagai pemangku kepentingan dan lembaga dapat terlibat. Organisasi seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Konferensi Guru Mata Pelajaran (MGMP), Dinas Pendidikan, Ikatan Profesi Pendidik, dan lainnya yang memiliki spesialisasi dalam topik tersebut. Peserta kunci dalam upaya sosialisasi dari madrasah ini harus mencakup pimpinan madrasah, staf pengajar, tenaga pendukung pendidikan, komite madrasah, pengurus yayasan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan seluruh komponen madrasah tersebut dalam proses sosialisasi bertujuan untuk membentuk pemahaman bersama mengenai Kurikulum Merdeka (IKM). Ketika semua pihak di madrasah mempunyai persepsi yang sama, hal ini akan memperlancar koordinasi dan partisipasi selama tahap implementasi. Selain itu, keterlibatan komite madrasah dalam sosialisasi IKM memastikan dukungan penuh mereka terhadap program dan inisiatif madrasah, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan mereka.

2) Mengikuti bimtek (lokakarya), pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, dan berbagi praktik penerapan yang berhasil.

Madrasah wajib berpartisipasi aktif dalam bimbingan teknis atau pelatihan terkait penerapan

⁴⁵ Ramdhani dan Isom, "Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah," 8–10.

kurikulum merdeka. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kurikulum merdeka, khususnya pada aspek teknis. Oleh karena itu, penting bagi individu-individu kunci, termasuk kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan guru, untuk menghadiri sesi bimbingan teknis ini. Didorong juga untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya misalnya tenaga kependidikan, komite madrasah, dan pengurus yayasan untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan implementasi yang efektif.

Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain pendekatan daring, luring, atau *hibrid* yang memadukan unsur daring dan luring. Kegiatan-kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, sehingga menawarkan fleksibilitas mengenai bagaimana staf sekolah dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peluang bimbingan dan pelatihan.

Kementerian Agama menyediakan struktur materi dan materi standar untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis. Semua sekolah dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengakses sumber daya ini secara gratis. Mereka juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan regional. Di sikurma.kemenag.go.id dan elearningmadrasah.kemenag.go.id, konten dapat diunduh, sehingga memudahkan akses dan pemanfaatannya oleh staf madrasah dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain materi pelatihan yang ditawarkan Kementerian Agama, madrasah mempunyai opsi untuk memanfaatkan bimbingan teknis dan sumber daya pelatihan yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui platform pembelajaran merdeka. Selain itu, mereka dapat mengakses materi panduan teknis dari berbagai sumber lain. Pendekatan ini memungkinkan

madrasah untuk meningkatkan sumber daya mereka dan mendiversifikasi strategi mereka untuk menerapkan kurikulum merdeka secara efektif.

f. Penyusunan Rencana Implementasi Kurikulum Merdeka

Dibawah ini merupakan beberapa aspek dalam konsep penyusunan implementasi kurikulum merdeka. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM)
- 2) Perencanaan Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
- 3) Rencana kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum merdeka
- 4) Perencanaan modul ajar kurikulum merdeka
- 5) Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5 PPRA)
- 6) Implementasi P5 PPRA
- 7) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik
- 8) Kerjasama seluruh warga madrasah dalam pengembangan kurikulum
- 9) Gambaran, penilaian serta pengembangan kurikulum.⁴⁶

g. Pengembangan Kompetensi Guru PAI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Efektivitas penerapan kurikulum merdeka sangat bergantung pada peran guru, karena merekalah yang bertanggung jawab melaksanakan kurikulum dalam praktiknya. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan siswa dalam upaya pembelajarannya. Penerapan

⁴⁶ Ramdhani dan Isom, "Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.,8-10

Kurikulum Merdeka mungkin menghadapi tantangan di berbagai daerah, terutama karena ketidaksiapan sejumlah besar guru. Salah satu faktor utama penyebab rendahnya kesiapan mereka adalah rendahnya kompetensi guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka.

Guru memegang peran sentral dan penting dalam sistem pendidikan, dan mereka memerlukan perhatian utama dan terfokus. Guru merupakan komponen integral yang terkait dengan seluruh aspek sistem pendidikan, dan peran mereka semakin penting ketika menangani permasalahan pendidikan. Mereka berfungsi sebagai tulang punggung struktur pendidikan formal, khususnya di lingkungan sekolah. Pengaruh guru sangat besar, khususnya dalam proses belajar mengajar, dan pengaruh mereka sangat penting dalam membentuk pengalaman pendidikan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan pada hakikatnya tidak terlepas dari kehadiran guru yang profesional dan kompeten. Intinya, perjalanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari guru dan berpuncak pada guru juga.⁴⁷

Penerapan Kurikulum merdeka merupakan pendekatan baru terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia, yang memberikan penekanan kuat pada kemandirian guru dan fleksibilitas dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Berikut beberapa atribut dan kompetensi penting yang harus dimiliki guru untuk mendukung penerapan Kurikulum Merdeka secara efektif:⁴⁸

1) Pemahaman Mendalam tentang Kurikulum Merdeka:

Guru perlu memahami secara menyeluruh konsep, tujuan, prinsip, dan filosofi dari Kurikulum

⁴⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Cet. ke-7 (Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

⁴⁸ Muhammad Iqbal dkk., "Peran Guru dalam Kebijakan Merdeka Belajar dan Implementasinya terhadap Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1 Pancur Batu" 05, no. 03 (2023): 9303-5.

Merdeka agar dapat mengimplementasikannya dengan baik.

2) Kemampuan Merancang Pembelajaran:

Guru harus memiliki kapasitas untuk menciptakan pengalaman belajar yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik individu. Hal ini meliputi perancangan kurikulum, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan pembangkitan sumber daya pendidikan.

3) Kemampuan Mengidentifikasi Kebutuhan Siswa:

Guru perlu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan minat belajar siswa secara individual dan kelompok. Hal ini memungkinkan penyusunan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa.

4) Penguasaan Teknologi Pendidikan:

Guru harus mampu memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif untuk mendukung pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan yang sesuai.

5) Kemampuan Mengintegrasikan Mata Pelajaran:

Guru perlu dapat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik dan terintegrasi.

6) Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi:

Guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan siswa, orangtua, dan rekan kerja. Kemampuan untuk bekerja sama dengan guru lain juga penting untuk pengembangan kurikulum yang terpadu.

7) Kemampuan Menerapkan Pendekatan Pembelajaran Aktif dan Kreatif:

Guru perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif dan kreativitas siswa, seperti diskusi, proyek, simulasi, dan sebagainya.

8) Kemampuan Evaluasi dan Pemantauan Pembelajaran:

Guru harus mampu melakukan evaluasi formatif dan sumatif untuk memonitor kemajuan belajar siswa, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan.

9) Kemampuan Mengembangkan Bahan Ajar:

Guru perlu mampu mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka, termasuk modul, lembar kerja, dan media pembelajaran lainnya.

10) Kepedulian terhadap Kesejahteraan Siswa:

Guru perlu memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan siswa secara keseluruhan, termasuk aspek kesehatan, kesejahteraan emosional, dan kebutuhan sosial.

11) Kemampuan Menanggapi Kebutuhan Inklusif:

Guru perlu mampu mengidentifikasi dan merespons kebutuhan siswa dengan keberagaman tingkat kemampuan, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga pembelajaran dapat inklusif dan adil.

12) Kemampuan Mengembangkan Kemandirian Belajar:

Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mandiri dalam belajar, termasuk mengembangkan keterampilan metakognitif, pengaturan diri, dan kebiasaan belajar efektif.

Memahami dan mengasah kompetensi ini akan memberdayakan guru untuk memberikan dampak besar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru sangatlah penting. Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan guru alat untuk meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan mereka, memastikan mereka dapat menerapkan kurikulum merdeka secara efektif. Betapapun baiknya konsep kurikulum tersebut, tidak akan terwujud jika guru sebagai praktisi di lapangan kurang memahami kurikulum secara menyeluruh.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, telah mengidentifikasi 14 bentuk kegiatan berbeda yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Kegiatan tersebut dikemukakan oleh para ahli dan lembaga dengan tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi guru.⁴⁹

- 1) Program pengembangan kualifikasi pendidikan guru
- 2) Program sertifikasi dan penyetaraan guru
- 3) Program pelatihan terpadu berbasis kompetensi
- 4) Program supervisi pendidikan
- 5) Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- 6) Simposium Guru
- 7) Program pelatihan tradisional lainnya
- 8) Menelaah dan menyusun artikel atau publikasi ilmiah.
- 9) Menghadiri pertemuan ilmiah
- 10) Melaksanakan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas).
- 11) Magang
- 12) Mengikuti berita actual dari media pembelajaran.
- 13) Terlibat dalam kelompok profesional dan berperan aktif di dalamnya.
- 14) Mendorong kerjasama antar rekan kerja.

Pengembangan kompetensi guru erat kaitannya dengan pertumbuhan karir profesional guru. Kegagalan untuk terlibat dalam pengembangan ini dapat menghambat kemajuan menuju profesionalisme yang lebih tinggi. Berbagai metode dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan pendidikan ini, termasuk pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dalam jabatan. Jalur pengembangan lainnya mencakup program pemerataan dan stratifikasi, program pelatihan integrasi kompetensi, program musyawarah guru mata pelajaran, pelatihan penulisan ilmiah, dan banyak lagi. Pengembangan guru dapat difasilitasi melalui mekanisme seperti Konferensi Guru Mata Pelajaran

⁴⁹ Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan profesi guru* (Alfabet, 2010), 67.

(MGMP), yang berfungsi sebagai platform efektif untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. MGMP menyediakan forum diskusi, kajian, dan pertukaran ilmu untuk merancang model pembelajaran yang efektif. Selain itu juga sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman guru demi perkembangannya.⁵⁰

Kelompok Kerja Guru (KKG) berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam proses pengajaran. Struktur ini dirancang untuk memfasilitasi inisiatif yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi profesional pendidik dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.⁵¹ Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) merupakan wadah yang memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalismenya dalam membimbing siswa. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan bekal para guru dengan pendidikan dan kemampuan dasar untuk mencapai keunggulan dan memberikan layanan yang lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.⁵²

Penerapan berbagai bentuk pengembangan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai. Syaefuddin dan Kurniatun telah mengidentifikasi beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pengembangan tenaga kependidikan:

- 1) Program pengembangan guru harus inklusif dan mencakup semua jenis staf kependidikan, termasuk staf struktural, fungsional, dan teknis.
- 2) Program tersebut harus menekankan perubahan perilaku untuk meningkatkan keterampilan profesional dan pelaksanaan tugas teknis di posisinya sendiri-sendiri.

⁵⁰ Rahimah, "Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran," *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 4.

⁵¹ Udin Saefudin Saud, *Pengembangan profesi guru/Udin Saefudin Saud* (Alfabeta, 2013).

⁵² Rahimah, "Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran," 5.

- 3) Dilakukan untuk memotivasi peningkatan peranan setiap pribadi kepada organisasi pendidikan.
- 4) Program-program ini harus fokus pada perubahan perilaku untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalnya dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari dalam perannya masing-masing.
- 5) Menciptakan program yang menjawab kebutuhan pengembangan profesional, pemecahan masalah, kegiatan peningkatan, pertumbuhan lapangan kerja, menjaga motivasi kerja, dan memperkuat ketahanan lembaga pendidikan.
- 6) Program pengembangan karir harus disesuaikan untuk kelompok tenaga pengajar tertentu.⁵³

Kompetensi pedagogi, profesional, personal, dan sosial merupakan salah satu hasil pengembangan karir guru. Empat kompetensi hasil tersebut saling berhubungan dengan kompetensi profesional, keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan tanggung jawab. Seorang guru yang memiliki kompetensi dapat dinilai berdasarkan kepribadiannya, pemahaman siswanya, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan komunikasinya. Kompetensi memegang peranan penting dalam menjadikan seorang guru menjadi profesional sejati, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, karena kompetensi tersebut penting dalam bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum.

Dalam bidang pendidikan, kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang dimiliki guru. Penting untuk mengembangkan kurikulum yang selaras dengan persyaratan kompetensi guru, sehingga memungkinkan mereka memenuhi peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Berhasil tidaknya proses pembelajaran tergantung pada struktur pendidikan, lingkungan sekolah, dan isi kurikulum, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi guru dalam membimbing dan mendidik siswa. Seorang guru kompeten mampu

⁵³ Saud, *Pengembangan profesi guru*, 68.

mengelola kelas secara efektif, sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan.

B. Perspektif Islam Tentang Pengembangan Kompetensi Guru PAI

Dalam agama Islam, pengembangan kompetensi guru PAI sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa dalil Al-Quran dan hadits yang menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi guru PAI dalam perspektif Islam. Salah satu dalil Al-Quran yang menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi guru PAI adalah surat al-Mujadalah tepatnya pada ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ ۱۱

Artinya : Allah tidak akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(S. al-Mujadalah,11)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, guru PAI perlu mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berkualitas kepada siswa. Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi juga menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi guru PAI. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”* Hadits ini menunjukkan bahwa seorang guru PAI harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat.

Sistem pendidikan Indonesia sangat mementingkan Pendidikan Agama Islam (PAI). Untuk membantu mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip Islam dan mengembangkan karakter mereka, guru besar PAI memainkan peran penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan

kompetensi guru PAI dari sudut pandang Islam guna meningkatkan taraf pendidikan agama Islam di Indonesia.

Perspektif agama Islam mengenai pengembangan kompetensi guru PAI menyoroti signifikansi manajemen dalam upaya tersebut. Manajemen berperan sebagai alat untuk mengintegrasikan ide, kompetensi, dan kinerja guru. Guru PAI perlu dikelola dengan manajemen yang memperhatikan lima aspek kompetensi, yakni kepribadian, profesionalisme, pedagogik, sosial, dan kepemimpinan. Kelima kompetensi ini harus menjadi kekuatan yang mengatasi kelemahan dalam pengembangan kompetensi guru, serta memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan saat menghadapi tantangan eksternal.

⁵⁴

Selain itu, perspektif agama Islam juga menekankan upaya guru PAI dalam meningkatkan kompetensi sosial, pedagogik, dan profesionalisme. Guru PAI perlu mengembangkan kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan nilai-nilai moderasi beragama dan memiliki keterampilan dalam mengelola peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik diartikan sebagai guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola peserta didik, serta memberikan posisi yang penting pada peserta didik sebagai bagian integral dengan hak dan kewajiban dalam sistem pendidikan yang holistik dan terpadu.

Fokus pada pengembangan kompetensi kepribadian dan profesionalisme guru PAI juga tercermin dalam perspektif agama Islam. Guru PAI diharapkan memiliki karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kepercayaan, kasih sayang terhadap murid, kesabaran, kesiapan berkorban, kepemimpinan yang baik terhadap anak-anak, kegembiraan, sikap baik terhadap sesama guru dan masyarakat, penguasaan mata pelajaran, minat pada mata pelajaran yang diajarkannya, serta pengetahuan yang luas. Profesionalisme guru juga

⁵⁴ Muh Hambali, "Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru PAI," *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (18 Maret 2016), <https://doi.org/10.18860/jmpi.v1i1.3229>.

diartikan sebagai pemenuhan tanggung jawab guru sebagai ahli di bidang teori dan praktik.⁵⁵

Pengembangan kompetensi pedagogik juga menjadi fokus dalam pandangan agama Islam. Guru PAI perlu mengembangkan kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan nilai-nilai moderasi beragama.⁵⁶ Hal ini bisa dilakukan melalui bimbingan peningkatan kompetensi guru PAI dalam aspek keterampilan mengajar yang terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama. Guru yang berkompotensi pedagogik adalah mereka yang mampu mendidik peserta didik karena memandang mereka sebagai elemen penting yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks sistem pendidikan yang menyeluruh dan terpadu.

Pandangan agama Islam juga menekankan peran guru PAI melalui peningkatan kompetensi sosial. Guru PAI diharapkan mengembangkan kompetensi sosialnya yang mencakup nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Peningkatan kompetensi sosial guru PAI dapat dicapai dengan membimbing mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.⁵⁷

Analisis Tafsir al-Fakhr al-Râziy dan Tafsir al-Sha'râwiyy pada surat al-Kahfi ayat 60-82 dianalisis berfokus pada keterampilan kepribadian guru dalam perspektif Islam. Karya tulis ini memanfaatkan metode riset dan pengembangan dengan menerapkan teori Borg dan Gall untuk mengidentifikasi kebutuhan. Data penelitian diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan kuesioner yang diberikan kepada dosen, mahasiswa PTKI, dan guru. Kajian memperbincangkan problematika kompetensi kepribadian guru dalam kerangka Tafsir al-Fakhr al-Râziy dan Tafsir al-

⁵⁵ Hena Haedaroh dan Mohamad Faisal Aulia, "Pengembangan Kompetensi Pedagogik Pada Guru Pendidikan Agama Islam," *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 3, no. 1 (3 Januari 2022): 1–13, <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v3i1.77>.

⁵⁶ Fatmawati, Fatmawati. "Implementasi Kompetensi Kepemimpinan Guru PAI dalam Mengaktualisasikan Akhlak Mulia Peserta Didik." (2020).

⁵⁷ Muhammad Ammar, Sajid. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Dalam Pengembangan Kompetensi Sosial (Studi Kasus Pada Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Di Madrasah Ibtidaiyah(MI) Mirfaul Ulum Gebang Sari Genuk Semarang)." (2017).

Sha'râwiy, serta menyoroti urgensi dan relevansinya bagi guru di era saat ini.

Dalam perspektif Islam, pengembangan kompetensi guru PAI memerlukan pendekatan pengajaran dan pelatihan yang disesuaikan dengan konteks dan lingkungan pendidikan agama Islam. Kombinasi pelatihan teori dan praktik yang tepat, yang difokuskan pada kebutuhan spesifik pendidikan agama Islam, dapat membantu guru PAI untuk mengembangkan kompetensinya.⁵⁸ Selain itu, peningkatan kompetensi guru PAI juga dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi pendidikan yang sesuai. Guru PAI harus memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi tersebut dan bersikap positif terhadap pengembangannya secara berkelanjutan.⁵⁹

Penerapan kompetensi kepemimpinan oleh guru PAI juga sangat penting dilihat dari sudut pandang agama Islam. Guru PAI mempunyai peran kepemimpinan dalam membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Untuk itu, guru PAI harus mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Pengembangan tersebut dapat dicapai dengan mendukung guru PAI dalam penguatan kompetensi kepemimpinan yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam.⁶⁰

Dalam kesimpulannya, pandangan agama Islam mengenai pengembangan kompetensi guru PAI menekankan pentingnya manajemen pengembangan kompetensi guru PAI, pengembangan kompetensi kepribadian dan profesionalisme, pengembangan kompetensi pedagogik, pengembangan kompetensi sosial, dan implementasi kompetensi kepemimpinan. Guru PAI perlu mengembangkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek, mulai dari kepribadian, profesionalisme, hingga kompetensi pedagogik, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan

⁵⁸ Hambali, "Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru PAI."

⁵⁹ Haedaroh dan Aulia, "Pengembangan Kompetensi Pedagogik Pada Guru Pendidikan Agama Islam."

⁶⁰ Fatmawati, Fatmawati. "Implementasi Kompetensi Kepemimpinan Guru PAI dalam Mengaktualisasikan Akhlak Mulia Peserta Didik." (2020).

ajaran Islam. Pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan lingkungan pendidikan agama Islam, penggunaan teknologi pendidikan yang tepat, dan pendampingan peningkatan kompetensi guru PAI pada aspek-aspek yang relevan dengan ajaran Islam dapat membantu guru PAI dalam mengembangkan kompetensi mereka.

Untuk meningkatkan kemampuan guru PAI berdasarkan perspektif Islam, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:⁶¹

1. Pelatihan dan pendidikan

Guru PAI harus memiliki pengalaman luas dalam bidang agama Islam dan pendidikan. Pelatihan teoritis dan praktis yang sesuai akan dengan konteks dan lingkungan pendidikan agama Islam akan membantu guru PAI dalam mengembangkan kompetensi mereka.

2. Pengembangan manajemen

Guru PAI perlu memahami manajemen pengembangan kompetensi dan menerapkannya dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pengajaran.

3. Pengembangan karakter

Guru PAI harus membangun karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti adil, percaya, suka terhadap murid-muridnya, sabar, rela berkorban, dan memiliki perbawa (gezag) terhadap anak-anak.

4. Pengembangan kompetensi profesional

Guru PAI perlu menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaannya, seperti memiliki penguasaan materi pelajaran yang baik, ketertarikan yang tinggi terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, pengetahuan yang luas, dan tanggung jawab sebagai ahli dalam aspek teori dan praktek di bidangnya.

5. Pengembangan kolaborasi

Kolaborasi antara guru, madrasah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam pengembangan kompetensi guru PAI. Dengan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya, guru PAI dapat

⁶¹ Hambali, "Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru PAI."

memberikan dukungan dan memperkaya proses pembelajaran.

6. Penggunaan teknologi

Guru PAI harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.

7. Evaluasi dan latihan

Evaluasi dan latihan merupakan bagian penting dalam proses pengembangan kompetensi guru PAI. Evaluasi dan latihan dapat membantu guru dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi guru PAI dan memastikan efektivitas dalam proses pembelajaran.

8. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan mencakup nilai-nilai moral yang hendak dicapai akan membantu guru PAI dalam mengembangkan kompetensi mereka.

9. Pengembangan kompetensi kepemimpinan

Pengembangan kompetensi kepemimpinan guru PAI merupakan alat untuk memastikan bahwa kompetensi, prinsip, dan cara guru bertindak semuanya sesuai. Guru PAI yang mempunyai kompetensi kepemimpinan yang baik akan mampu mengembangkan akhlak mulia siswa dan mengaktualisasikan ajaran Islam.

10. Pengembangan sikap dan perilaku

Guru PAI harus membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menguasai mata pelajaran, bersikap baik terhadap guru dan masyarakat.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, guru PAI dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam perspektif Islam dan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkesan dan inklusif.

C. Kerangka Berpikir

Salah satu bagian dalam kurikulum adalah unsur pendidik, yakni guru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru, termasuk guru PAI, diharapkan memiliki beberapa kompetensi esensial. Keempat kompetensi

tersebut melibatkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional.

Peran guru dalam menerapkan kurikulum merdeka sangat dibutuhkan. Guru PAI harus mampu beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum ini para guru dituntut harus kreatif dan inovatif serta profesional.

Kepala madrasah memiliki peran besar dalam hal ini karena dia memiliki tanggung jawab bagaimana menjadikan implementasi kurikulum merdeka berjalan dengan sukses khususnya adalah kompetensi guru. Maka dari itu berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi guru PAI agar mampu beradaptasi dengan kurikulum merdeka.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

